

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Merebaknya virus Covid-19 membuat seluruh aktivitas global menjadi terhambat. Berbagai upaya seperti pembatasan sosial dan vaksinasi dilakukan guna mencegah penyebaran virus serta untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Dampak yang ditimbulkan dari munculnya virus ini tidak dapat dihindari terutama pada bidang ekonomi. Banyak perusahaan merugi karena terhambatnya kegiatan operasional perusahaan. Hal ini juga menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kredit ataupun utang-utangnya. Pendapatan yang diprediksi dapat diterima menjadi tertunda karena kondisi krisis yang dialami setiap perusahaan. Pandemi yang melanda setiap negara di dunia menandakan bahwa ketidakpastian lingkungan selalu ada. Maka dari itu, konsep konservatisme akuntansi dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dimana konsep ini mengedepankan kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir risiko ketidakpastian lingkungan.

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan finansial dari suatu perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan sangat bermanfaat bagi para *stakeholder* baik itu yang berada di internal maupun eksternal perusahaan, salah satunya investor sebagai pemilik perusahaan. Investor membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk menilai apakah investasi modal yang ditanamkan pada perusahaan sudah digunakan secara tepat untuk keberlangsungan usaha dan dapat memberikan *return* kepadanya. Lalu investor dapat mengambil keputusan apakah ia harus meningkatkan atau mengurangi jumlah investasi di perusahaan tersebut. Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat dan memerlukan informasi dari laporan keuangan menjadikan penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga tidak memberikan informasi palsu kepada para pemangku kepentingan

Laporan keuangan dapat mencerminkan kapasitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan serta ringkasan aktivitas perusahaan dalam suatu kurun waktu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi

2015) mengungkapkan jika tujuan dari penyajian laporan keuangan adalah untuk umum (*General Purpose Financial Statements*) sehingga dapat disandingkan baik itu dengan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya maupun dengan laporan keuangan pada perusahaan lain. Manajemen bebas untuk memutuskan metode akuntansi apa yang sebaiknya dipakai untuk merumuskan laporan keuangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat bagi perusahaan tersebut mengacu pada ketentuan dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akan tetapi pada praktiknya, kebebasan dalam menentukan metode akuntansi yang digunakan menjadi celah bagi manajemen untuk memanipulasi angka dan jumlah yang tertera pada laporan keuangan sehingga menyebabkan laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Metode akuntansi yang dipilih sangat berpengaruh atas angka-angka yang tercatat di dalam laporan keuangan. Jika angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya maka dapat menyesatkan para pemangku kepentingan dan keputusan yang diambil oleh mereka menjadi tidak tepat.

Prinsip konservatisme diperlukan dalam mengelola perusahaan guna mencegah tindakan agresif yang dilakukan manajer dalam menghasilkan laba serta menjaga transparansi dan mengurangi risiko salah saji atau ketidaksesuaian dalam menilai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Perilaku kehati-hatian yang dilakukan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan untuk menghindari tindakan agresif yang mengarah pada *fraud* untuk mengakui pendapatan dapat disebut sebagai konservatisme akuntansi. Prinsip konservatisme akuntansi mengharuskan manajer untuk berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan laba, mempercepat pengakuan biaya dan rugi, serta membesarkan penilaian kewajiban dan mengecilkan penilaian aset (El-Haq et al., 2019).

Perbankan memiliki peran yang penting sebagai salah satu lembaga keuangan dalam membangun perekonomian suatu negara. Bank berperan sebagai lembaga yang menghubungkan (intermediasi) antara pemilik modal dengan pihak kreditor, sehingga secara efektif dapat membantu alokasi sumber daya ekonomi (Ismanto et al., 2019). Kondisi kesejahteraan ekonomi dari suatu

negara pun dapat dengan mudah dilihat dari cara bank dalam mengelola dana masyarakat yang dihimpun dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Simatupang (2019) di dalam jurnalnya menyebutkan bahwa di asia dan amerika latin kepemilikan aset oleh sektor perbankan mencapai 60% pada tahun 1994 di banding dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan di Indonesia rasionya lebih tinggi hingga mencapai 90%.

Pentingnya bank dalam memegang peranan sebagai penggerak perekonomian suatu negara diharapkan bisa lebih berperan aktif di setiap kegiatan pembangunan baik bersifat nasional maupun regional. Maka dari itu, pihak-pihak yang membutuhkan dana segar dapat terpenuhi sehingga roda perekonomian dapat bergerak. Dengan demikian, kesehatan terhadap suatu bank perlu diperhatikan. Akan tetapi, masih sering ditemukan kasus-kasus manipulasi laporan keuangan contohnya seperti yang dikutip dari Kompas.com tahun 2020, Komisi XI DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan melakukan pemanggilan kepada Direktur Utama PT Bank BTN. Rapat itu dilakukan untuk membahas dugaan praktik *window dressing* atau manipulasi laporan keuangan Bank BTN tahun 2018. Ada tiga hal yang menjadi pokok bahasan rapat tersebut antara lain terkait dengan pelanggaran hukum termin pertama sejumlah Rp 100 Miliar di tahun 2014 yang tidak sesuai dengan kegunaanya karena pembayaran tersebut seharusnya digunakan sebagai dana untuk proyek perumahan tetapi menurut laporan, pencairan dana tersebut digunakan untuk membayar utang PT BIM (Batam Island Marina). Laporan berikutnya mengenai penambahan kredit atau *top up* sebesar Rp 200 miliar di bulan September 2015 kepada perusahaan yang sama tidak berlandaskan pada proses uji tuntas (*due diligence*) yang cermat. Proses uji tuntas sangat penting bagi perusahaan khususnya di sektor jasa keuangan karena hal ini merupakan konsep kehati-hatian bagi bank dalam menyalurkan kreditnya dengan pemeriksaan bertahap kepada debitur, sehingga bank dapat melihat tingkat risiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit tersebut. Dugaan manipulasi laporan keuangan selanjutnya yang dilaporkan adalah kegiatan restrukturisasi kredit Bank BTN dengan menjual piutang yang bermasalah kepada PT PPA

(Perusahaan Pengelolaan Aset). Hal ini dilakukan Bank BTN agar jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang dimiliki dapat berkurang. Tidak dilakukannya proses uji tuntas dengan baik hingga penjualan kredit bermasalah dapat menjadi alasan bahwa perlunya menjaga prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* karena hal tersebut merupakan prinsip utama di dalam industri perbankan.

Fenomena manipulasi laporan keuangan lainnya dilakukan oleh PT Bank Bukopin seperti yang dilansir dari finance.detik.com tahun 2018, Bank Bukopin melakukan modifikasi data kartu kredit yang berjumlah lebih dari 100.000 kartu selama 5 tahun. *Fraud* yang dilakukan Bank Bukopin ini menyebabkan penggelembungan komisi secara tidak wajar pada akun kredit dan pendapatan. permasalahan modifikasi ini tidak terdeteksi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan seperti audit internal, auditor independen, Bank Indonesia, dan OJK. Manajemen Bank Bukopin menyampaikan permintaan kepada KAP untuk melakukan *restated*. Kemudian hasil *restated* yang dilakukan menyebabkan penurunan atas laba bersih 2016 dengan jumlah sebesar 1,08 triliun rupiah menjadi 183,56 miliar rupiah. Pendapatan provisi dan komisi menjadi akun dengan penurunan terbesar yang sebelumnya berjumlah 1,06 triliun rupiah menjadi 317,88 miliar rupiah. Pembiayaan untuk Bank Syariah Bukopin (BSB) yaitu anak usaha Bank Bukopin juga mengalami revisi karena terdapat peningkatan pada akun beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan peningkatan sebesar Rp 148,6 miliar pada beban perseroan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Iskandar & Sparta (2019) yang menunjukkan bahwa *Bonus Plan* yang diharapkan manajer bergantung pada laba yang diperoleh perusahaan sehingga manajer akan meninggikan laba untuk memperoleh bonus dan perusahaan akan menekan *Political Cost* dengan menerapkan Konservatisme Akuntansi. Perbedaan dari penelitian ini adalah penambahan variabel independen Kesempatan Bertumbuh, Insentif Pajak dan Pensiun CEO karena masih terdapat inkonsistensi hasil dari variabel ini terhadap Konservatisme Akuntansi, lalu mengganti indikator *Political Cost*

menjadi Intensitas Modal dengan pengukuran *Capital Intensity*, selain itu sektor perbankan dijadikan sebagai objek pada penelitian ini.

Konservatisme diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesempatan bertumbuh, rencana bonus, biaya politis, insentif pajak, dan pensiun CEO. Kesempatan untuk bertumbuh mengharuskan perusahaan untuk melakukan investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan (Rivandi, 2019). Dana yang besar dibutuhkan untuk berinvestasi pada sektor yang menguntungkan dengan harapan memperoleh arus kas di masa mendatang. Kebutuhan akan dana yang besar membuat perusahaan meminimalisir laba yang sejalan dengan konsep konservatisme akuntansi. Rahayu & Gunawan (2018) meneliti tentang variabel *company growth* dan mendapatkan hasil bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menerapkan tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi pula. Lalu El-Haq et al. (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan konservatisme seringkali memiliki dana cadangan yang bisa dipakai untuk melakukan pembiayaan investasi dengan maksud untuk memaksimalkan *growth opportunities*. Sedangkan Pada penelitian Putri et al. (2021) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak dipengaruhi oleh variabel *growth opportunity*. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan perusahaan untuk bertumbuh kepemilikannya sebagian besar berasal dari pihak eksternal sehingga perusahaan tidak meminimalisir tingkat laba yang mana berarti tidak menerapkan konservatisme akuntansi.

Rencana bonus merupakan bentuk apresiasi kepada para manajer atas kinerjanya (Haniifah et al., 2021). Perusahaan yang memiliki rencana bonus mendorong manajer untuk membuat laba perusahaan menjadi sesuai dengan target. Kondisi ini dapat membuat manajer untuk mengakui pendapatan lebih cepat sehingga mengabaikan konsep konservatisme akuntansi. Iskandar & Sparta (2019) yang menunjukkan bahwa *Bonus Plan* yang diharapkan manajer bergantung pada laba yang diperoleh perusahaan sehingga manajer akan meninggalkan laba untuk memperoleh bonus. Sedangkan Penelitian El-Habashy (2019) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dipengaruhi secara positif tidak signifikan oleh variabel kepemilikan manajer. Hal ini karena struktur

kepemilikan saham negara Mesir lebih terkonsentrasi daripada di negara maju. Dalam hal ini, biaya agensi mengarah pada peningkatan akuntansi konservatif sebagai pengatur perilaku oportunistik manajer.

Biaya politis muncul akibat adanya pertentangan ditengah kebijakan yang dibuat pemerintah dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Iskandar & Sparta, 2019). Biaya politis dapat diketahui dengan melihat ukuran perusahaan tersebut (Rahayu & Gunawan, 2018). Perusahaan besar memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mendapat biaya politis karena mampu memberikan efek yang besar pula bagi para stakeholder terutama pemerintah. Pemerintah dapat menaikkan biaya pajak kepada perusahaan tersebut sehingga manajer akan berupaya untuk meminimalisir laba untuk mengurangi tanggungan biaya politis yang akan diterima. pada penelitian Iskandar & Sparta (2019) memaparkan jika perusahaan akan menekan *political cost* dengan menerapkan konservatisme akuntansi. Lalu penelitian Putri et al. (2021) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak dipengaruhi oleh intensitas modal sebagai indikator biaya politis karena penyajian laba yang konservatif tidak ditimbulkan dari intensitas modal yang dimiliki perusahaan.

Insentif pajak merupakan suatu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor baik itu yang berada di luar ataupun dalam negeri untuk aktivitas di kawasan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi (Sumantri, 2018). Insentif pajak yang diberikan dapat memicu perusahaan dalam melakukan konservatisme akuntansi. Penelitian Stiawan et al. (2022) dan Sumantri (2018) menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Pemberian insentif pajak dengan mengurangi tarif pajak dapat memicu praktik konservatisme akuntansi pada tahun sebelum diberlakukannya tarif yang baru.

Menurut Tazkiya & Sulastiningsih (2020) memaparkan bahwa dalam suatu perusahaan yang memiliki *Chief Executive Officer* (CEO) yang akan mendekati masa pensiun jabatannya cenderung meningkatkan laba dan mengabaikan prinsip konservatisme akuntansi dengan cara melakukan praktik manipulasi seperti memperkecil biaya yang harus dibayar dan melebih-lebihkan penjualan kredit sehingga laba yang akan dihasilkan perusahaan

tersebut tinggi. Tazkiya & Sulastiningsih (2020) di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *CEO retirement* dengan penjelasan bahwa peningkatan laba dilakukan agar bonus yang diperoleh tinggi dan tidak ada stigma negatif terhadap CEO yang akan pensiun dari jabatannya.

Berdasarkan fenomena dan masih ditemukannya *gap research* pada jurnal terdahulu maka peneliti mengangkat judul penelitian yang membahas mengenai Pengaruh Kesempatan Bertumbuh, Rencana Bonus, Biaya Politis, Insentif Pajak, dan Pensiun CEO terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

I.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumuskan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah kesempatan bertumbuh memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi?
2. Apakah rencana bonus memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi?
3. Apakah biaya politis memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi?
4. Apakah insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi?
5. Apakah pensiun CEO memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui secara empiris pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap konservatisme akuntansi.
2. Mengetahui secara empiris pengaruh rencana bonus terhadap konservatisme akuntansi.

3. Mengetahui secara empiris pengaruh biaya politis terhadap konservatisme akuntansi.
4. Mengetahui secara empiris pengaruh insentif pajak terhadap konservatisme akuntansi.
5. Mengetahui secara empiris pengaruh pensiun CEO terhadap konservatisme akuntansi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat terhadap pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan nilai perusahaan dengan melihat beberapa aspek antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberi kontribusi ilmiah mengenai kajian yang berkaitan dengan Pengaruh Kesempatan Bertumbuh, Rencana Bonus, Biaya politis, dan insentif pajak terhadap Konservatisme Akuntansi.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan atas ilmu yang sudah dipelajari seputar Pengaruh Kesempatan Bertumbuh, Rencana Bonus, Biaya politik, dan insentif pajak terhadap Konservatisme Akuntansi.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang dibutuhkan bagi investor dalam memutuskan investasi yang dilakukan secara cermat dalam menggunakan informasi laporan keuangan

- d. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ataupun tambahan informasi untuk memahami konsep konservatisme akuntansi dan faktor-faktor yang terkait.